

**PENGARUH KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DAN PENGAWASAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DESA TANJUNG KECAMATAN
HAMPARANG RAWANG**

Yesi Citra Dewi, Afriyanti, Bustian
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

citradewiyesi@gmail.com

afriyanti@gmail.com

bustian@gmail.com

ABSTRACT

Whith the formulation of thre proble, whether the performance of village-owned enterprises and the supervision of the village consultative body have a partial and simultaneous influence on the development of the village of tanjung, stretches of the tawang sub-district, this study aims to determine the influence Of the performance of village-owned enterprises (BUMDes) and the supervision of the village consultative body (BUMDes). (BPD) has a partial and simultaneous effect on increasing the development of tanjung village, sampan rawang subdistrict, this study uses the quantitative method. The population and sample in this study were 33 people. The analytical tool used in this study was to use the coefficient of determination above to show the nagnitude (R) . is 0,183 (there is the influence of the two dependent variables from the correlation coefficient 0,183) this means that 18,3% of the variation in the increase in development can be explained by the variation of the 2 indevident variables, namely the performance of village-owned enterprises (X1) and supervision of village consultative bodes (X2) ,while the remaining 81,7% (100%-18,3%) was influenced by other variables nit examined. it is also proven that the F test turns out to be a value of $F = 3,369$ with a significance level smaller than 0,05 ($0,048 > 0,05$) ,so it can be concluded that the performance of village-owned enterprises and the increase in development have a positive effect on the supervision of village consultations.

Kata kunci : Performance of village Owned Enterprises (BUMDes, Supervision of village Body (BPD) ,Development Improvement.

ABSTRAK

Dengan rumsan masalah apakah kinerja badan usaha milik desa dan pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pembangunan desa tanjung kecamatan hamparang rawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Pengaruh Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pembangunan desa tanjung kecamatan hamparang rawang. penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 33 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan koefisien determinasi diatas menunjukkan

besarnya (R^2) adalah 0,183 (adanya pengaruh kedua variabel dependen dari koefisien korelasi 0,183) hal ini berarti 18,3% variasi peningkatan pembangunan dapat dijelaskan oleh variasi ke-2 variabel independent, yaitu kinerja badan usaha milik desa (X1) dan pengawasan badan permusyawaratan desa (X2), sedangkan sisanya sebesar 81,7% (100%-18,3%) dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini terbukti juga uji F ternyata didapat nilai $F=3,369$ dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,048 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa kinerja badan usaha milik desa dan peningkatan pembangunan berpengaruh positif terhadap pengawasan badan permusyawaratan desa.

Kata Kunci : *Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Peningkatan Pembangunan.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah Lembaga desa yang mengurus kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk menunjang peningkatan ekonomi desa, hal yang bisa memberikan perubahan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mendirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proposional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menimbang “bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikannya Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan keputusan dan potensi desa”. BUMDes yang merupakan Lembaga sosial bertujuan untuk memberikan hak atau kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan dalam Lembaga komersial BUMDes merupakan lembaga yang memberikan keuntungan melalui penawaran sumber daya local. Maka dari itu desa harus bisa memanfaatkan hasil alam serta dapat menggali potensi desa sebaik mungkin dari segi Sumber Daya Alam (SDA) yang merupakan keseluruhan dari faktor fisik kimia biologi dan sosial yang dapat mendukung tercapainya suatu tujuan dari organisasi. Dan dari segi Sumber Daya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai Lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai Lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya loca (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012). Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industry kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hingga dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007).

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016). Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015). Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Dari pengamatan awal penulis diindikasikan adanya beberapa fenomena dalam kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Peningkatan Pembangunan seperti:

1. Kurangnya kerja sama ataupun pengawasan berbagai pihak masyarakat terutama masalah pembangunan desa.
2. Pelaksanaan pemerintah dan pembangunan baik dibidang infrastruktur jalan, jembatan, Pendidikan, dan sebagainya masih belum maksimal pelaksanaan, dengan kata lain usaha-usaha yang dilakukan pemerintah

desa yang merupakan bentuk peningkatan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik.

3. Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam memberikan petunjuk dan arahan perihal keberhasilan pembangunan desa.
4. Kurangnya transparansi tentang SHU (sisa hasil usaha) antara anggota BPD dengan BUMDes.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah di kemukakan penulis tertarik untuk mengambil judul studi penelitian: **“Pengaruh Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Hamparang Rawang”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Peningkatan Pembangunan

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap Lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus disesuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut BPS, jumlah desa dengan status tertinggal masih mendominasi dari jumlah seluruh desa Indonesia.

Kartasasmita (2001:66), mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Adapun tujuan pembangunan desa, adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan kabupaten;
- 2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan;
- 3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman, dan sehat;
- 4) Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan;
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah;
- 6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah; dan
- 7) Pembangunan perdesaan.

Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan infestasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kinereja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja dan bagaimana proses suatu pekerjaan berlangsung (Armstrong dan baron, 1996). Kerja karyawan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja BUMDes, tinggi rendahnya tingkat kinerja pengelola Lembaga akan berpengaruh terhadap kinerja Lembaga (Gibson 1996).

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan atau pengelola, diantaranya yang pertama adalah kompensasi (dalam bentuk gaji) yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan berarti dengan pemberian kompensasi yang adil sesuai dengan pekerjaan karyawan maka akan menyebabkan peningkatan kinerja karyawan (Pramana dan Sudharma, 2013). Faktor berikutnya adalah pengalaman kerja, yang memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Pengalaman kerja merupakan suatu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki seseorang sebagai akibat dari pekerjaan yang pernah dilakukan oleh seseorang pada suatu periode sebelumnya (Robbin dan Timothy, 2008). Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang adalah motivasi kerja. Menurut Aristarini (2013) menyatakan bahwa tingkat motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan suatu keinginan untuk melakukan usaha yang lebih tinggi dari periode sebelumnya untuk mencapai hasil yang lebih maksimal (Robbins, 2003). Faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja seseorang adalah gaya kepemimpinan, menurut Sugianto (2011) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja seseorang. Gaya kepemimpinan adalah pola khas yang dipilih oleh seorang pemimpin pada saat berhadapan dengan staf atau bawahannya agar bersedia untuk melakukan suatu pekerjaan (Dubrian,2000).

Syarat-Syarat pengurus BUMDes :

1. Warga desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Karena BUMDes adalah Lembaga usaha maka jiwa wirausaha menjadi syarat penting.
2. Berdomisili dan menetap didesa sekuran-kurangnya dua tahun.
3. Berkepribadian baik,jujur,adil,cakap, dan perhatian terhadap uasaha ekonomi desa.
4. Berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa "BPD" merupakan Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"- nya desa, BPD merupakan Lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD dapat dikatakan sebagai Lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat .hal ini sejalan dengan ungkapan soekanto "2004:2019".

Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain ialah adalah Lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: "badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan di tetapkan secara demokratis.

BPD dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan apakah rencana pembangunan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya serta memberi masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan pengamatan peneliti pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Infastruktur desa Bataka belumterlalu baik, karena BPD tidak menjalankan tugas dengan baik hanya mementingkan urusan pribadi sedangkan tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat sering terabaikan sehingga beredampak buruk kepada kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan PP No. 72/ 2005 tentang Desa, dijelaskan pada Pasal 35, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang: membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; membentuk panitia pemilihan kepala desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai 14 tugas antara lain sebagai berikut :

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspiransi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
11. Melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
13. Pemerintah desa dan Lembaga desa lainnya ;dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin menjelaskan, memaparkan secara objektif mengenai “Pengaruh kinerja badan usaha milik desa dan pengawasan BPD terhadap peningkatan pembangunan”.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah ,jurnal, referensi dari buku teori, laporan, dokumen. yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut Observasi menurut Poulina (Indrawati dkk., 2007) mengemukakan bahwa observasi adalah suatu studi yang dilakukan secara terencana dan sistematis melalui pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati peningkatan pembangunan. Kuesioner-Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan model skala Likert yang terdiri atas beberapa item dengan empat alternatif jawaban, yaitu SL (selalu), SR (sering), JR (jarang), TP (tidak pernah) dengan beberapa pernyataan tentang peningkatan pembangunan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan awal penelitian di lapangan menemukan adanya fenomena-fenomena seperti pengaruh kinerja badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap peningkatan pembangunan. Setelah peneliti penelitian di lapangan dengan cara menggunakan kuesioner dari tanggal 27 agustus 2022 sampai tanggal 11 september 2022 dan mendapat hasil penelitian dengan uji statistic seperti uji validitas dan reabilitas, uji prasyarat analisis, analisis linear berganda, koefisien determinasi, uji F dan uji t.

Pembahasan Pengaruh Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (X1) Terhadap Peningkatan Pembangunan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel kinerja badan usaha milik desa (BUMDes) (X1) secara statistic berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan (Y). dengan demikian menerima hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja badan usaha milik desa (BUMDes) berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan desa tanjung kecamatan hamparang rawang.

Pembahasan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (X2) terhadap Peningkatan Pembangunan (Y).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) (X2) secara statistic berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan (Y). dengan demikian menerima hipotesis yang menyatakan bahwa pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan desa tanjung kecamatan hamparang rawang.

Pembahasan Kinerja Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) (X1) dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (X2) Terhadap peningkatan pembangunan (Y).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel kinerja badan usaha milik desa (BUMDes)(X1) dan pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) (X2) secara statistic sama-sama berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan (Y). dengan demikian menetima hipotesis yang menyatakan bahwa pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan desa tanjung kecamatan hamparang rawang.

Alasan kenapa pengaruhnya bisa kecil : Karena kurangnya perhatian, Kerjasama, dan kepercayaan anggota BPD kepada peningkatan pembangunan desa tanjung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian dan analisis bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Hamparang Rawang sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji ANOVA atau F tes diperoleh nilai signifikansi 0,048 lebih kecil dari 0,05 ($0,048 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peningkatan Pembangunan berpengaruh positif terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Besarnya pengaruh simultan diatas menunjukkan besarnya (R^2) adalah 0,183 (adanya pengaruh kedua variabel dependen dari koefisien korelasi 0,183) hal ini bearti 18,3% variasi peningkatan pembangunan dapat dijelaskan oleh variasi ke-2 variabel independent, yaitu kinerja badan usaha milik desa (X1) dan pengawasan badan permusyawaratan desa (X2) , sedangkan sisinya sebesar 81,7%(100%-18,3%) dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan secara parsial besar pengaruh kinerja badan usaha milik desa (BUMDes) (X1) terhadap peningkatan pembangunan (Y) adalah 3,848%. Besar pengaruh pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) (X2) terhadap peningkatan pembangunan (Y) adalah 14,506%.
3. Variabel yang dominan mempengaruhi kinerja dapat dilihat dari oleh hasil regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Didapat variabel pengawasan badan permusyawaratan desa (X2) sebesar 14,506% mempengaruhi peningkatan pembangunan, disebabkan variabel

tersebar mempengaruhi peningkatan pembangunan desa tanjung kecamatan hamparang rawang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansari,B.,et al.2016. *Sustainable Enterpreneurhsip in Rural Areas.Research Journal of Environmental and Earth Science Vol. 5 No. 1 :26-31.*
- Armstrong,Baron.1996. *Handbook of Personnel Management Practices, London Kogan Page Limited.*
- Aristarini, Luh, I Ketut Kirya , and Ni Nyomman Yulianthini. 2013. “*Pengaruh Pengalaman Kerja ,Kompetensi Sosial Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bagian Pemasaran Pt Adira Finace Singaraja.*”*Jurnal Jurusan Manajemen 2(1).*
- Budiono, P . 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bujonegoro(Study Di Desa Nginginrejo Kecamatn Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Muda, 4(1), 116-125.*
- Ghozali,Iman. (2016:52). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Gibson, James Iet al.1996. *Organisasi Perilaku , struktur, Proses, Deterjemahkan oleh Ninuk Adrian.Jakarta : Binarupa Aksara.*
- Hotel Gorden Harvest. (2020). *fungsi dan tugas BPD serta BUMDES (badan usaha milik desa)*
- Hariany Idrys,Samsinar,Warka Syachbrani,2021.*Pengaruh kinerka badan usaha milik desa terhadap peningkatan pembangunan desa di Sulawesi selatan.*
- Handoko T Handoko. 2009:90. *Manajemen Personalia dan SDM. Yogyakarta :Edisi 2 , BPEF*
- Kastasasmita,2001:66. *Ginandja, Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta :Pustaka CIDESINDO.*
- Mulyanto,2013. *Edukasinfo.com.Indikator Pembangunan Desa.*
- Muhammad Elsa,Tomisa M.Syafitri. 2020.*Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli di Desa Suka Jadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 9(1),91-101.*
- Sa’dullah,2016. *Pentingnya Media Audio Visual dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Republik Indonesia*
- Sidik, F .2015.*Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa.Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , 19(2),115-131.*
- Sugianto.2011.*Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja di Pt Madubaru Jogjakarta.*
- Probowo,T.H.E.2014. *Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable PoverlyAlleviation Model Village Community Study in*

- Bleberan-Gunung kidul Indonesia. World Applied Scienes Journal 30(Innovation Cballenges in Multidiciplinary Research & Practice) :19-26.*
- Robbinss,S.P.2006. *Perilaku Organisasi Jakarta : Pt. Indeks,Kelompok Gramedia.*
- Wijanarko,Agung Septian .2012. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto (Skripsi). Surabaya :universitas pembangunan nasional "Veteran".*